

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan masih menjadi persoalan sosial yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga dengan keterbatasan akses keluarga terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang peningkatan kualitas hidup. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2025 tercatat sebesar 8,47 persen, menurun dari posisi September 2024 sebesar 8,57 persen. Meski terjadi penurunan, jumlah penduduk miskin yang mencapai 23,85 juta orang tetap menunjukkan bahwa persoalan ini masih signifikan dan membutuhkan strategi komprehensif serta berkelanjutan. Dalam konteks ini, kebijakan perlindungan sosial menjadi instrumen penting untuk membantu rumah tangga miskin bertahan dari tekanan ekonomi sekaligus memperkuat kapasitas mereka untuk memperbaiki kesejahteraan secara bertahap. nasional. Salah satu program yang dirancang untuk tujuan tersebut di Indonesia adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan agar mereka dapat meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Secara konseptual, program bantuan tunai bersyarat seperti PKH tidak hanya berfungsi mengurangi beban konsumsi rumah tangga dalam jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk mendorong investasi keluarga pada pembangunan modal manusia. Hal ini sejalan dengan temuan Cahyadi et al, (2020) yang menunjukkan bahwa program bantuan tunai bersyarat di Indonesia memiliki dampak kumulatif terhadap indikator pendidikan dan kesehatan, serta dengan argumentasi Mookherjee & Napel (2021) bahwa *conditional cash transfer* memiliki rasionalitas kesejahteraan karena dapat memperkuat keputusan keluarga dalam berinvestasi pada pendidikan anak dan kesejahteraan rumah tangga.

Pelaksanaan PKH telah memberikan sejumlah dampak positif. Penelitian Rukmana & Citra (2022) menunjukkan bahwa bantuan PKH membantu meningkatkan pendapatan keluarga, sebagian digunakan untuk kebutuhan pokok dan pendidikan anak, serta dalam beberapa kasus dimanfaatkan sebagai modal

usaha. Hal ini mengindikasikan bahwa PKH mampu meringankan beban pengeluaran, mendukung keberlangsungan pendidikan, dan memperbaiki akses layanan kesehatan. Nurhasikin & Putri (2025: 3) juga menegaskan bahwa PKH merupakan instrumen penting dalam strategi pengurangan kemiskinan di Indonesia. Namun, manfaat tersebut tidak otomatis berarti bahwa bantuan sosial selalu berhasil mendorong transformasi sosial-ekonomi keluarga secara berkelanjutan. Haliim, W., & Hakim, (2024) menunjukkan bahwa implementasi bantuan sosial PKH dapat memunculkan ketergantungan ketika bantuan diterima terus-menerus tanpa diikuti penguatan kapasitas ekonomi, pendampingan yang efektif, dan dukungan pemberdayaan produktif. Oktafia (2025: 2304) juga menambahkan bahwa ketergantungan ini diperparah oleh kurangnya integrasi antara program bantuan sosial dengan program pemberdayaan, sehingga KPM tidak terdorong untuk mengembangkan potensi ekonomi secara mandiri. Dalam arah yang lebih luas, McCarthy et al, (2024) juga menegaskan bahwa bantuan tunai tidak hanya bekerja sebagai instrumen distribusi kesejahteraan, tetapi sekaligus membentuk cara masyarakat memaknai kemiskinan, kelayakan menerima bantuan, dan relasinya dengan negara. Artinya, bantuan sosial dapat berfungsi kuat sebagai instrumen protektif, tetapi belum tentu berkembang optimal menjadi instrumen transformasi sosial-ekonomi keluarga apabila desain implementasinya tidak benar-benar mendorong kemandirian.

Berdasarkan hasil observasi awal berkaitan dengan Dilema antara bantuan sosial Program Keluarga Harapan dengan Kemandirian ekonomi keluarga, terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan yaitu kebanyakan KPM memanfaatkan bantuan ini hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak digunakan untuk membuka usaha ataupun berinvestasi, lalu adanya ketergantungan terhadap bantuan sosial Program Keluarga Harapan ini khususnya lansia karena kebanyakan dari lansia ini sepenuhnya mengandalkan bantuan untuk kehidupannya sehari hari, selain itu juga karena Program Keluarga Harapan ini belum sepenuhnya terintegrasinya dengan program pemberdayaan ekonomi sehingga KPM ini belum bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki dirinya seperti melalui pelatihan usaha dan literasi keuangan agar mampu memanfaatkan dana bantuan secara produktif.

Fenomena ketergantungan ini dapat dipahami melalui perspektif teori dilema sosial. “Dilema sosial adalah situasi di mana setiap anggota kelompok memiliki insentif yang jelas dan tegas untuk membuat pilihan yang jika dibuat oleh semua anggota memberikan hasil yang lebih buruk bagi semua orang daripada yang akan mereka terima jika tidak ada yang membuat pilihan tersebut. Oleh karena itu, dengan melakukan apa yang tampaknya masuk akal dan rasional secara individu, orang-orang akhirnya mendapatkan hasil yang lebih buruk daripada yang akan mereka dapatkan jika mereka bertindak tidak masuk akal atau irasional” Dawes & Messick (2000: 111). Kutipan tersebut dapat dimaknai bahwa tindakan yang dianggap rasional pada tingkat individu seperti terus mengandalkan bantuan sosial tanpa berupaya meningkatkan kemandirian justru menimbulkan konsekuensi negatif ketika dilakukan secara kolektif. Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH), kondisi ini tampak ketika keluarga penerima manfaat (KPM) memilih untuk terus bergantung pada bantuan sosial. Secara individual, pilihan tersebut mungkin terasa rasional karena mampu memenuhi kebutuhan dasar. Namun, jika pola ketergantungan ini terjadi secara luas, tujuan utama PKH untuk mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan jangka panjang menjadi sulit tercapai.

Berdasarkan uraian tersebut, PKH menghadirkan kondisi yang bersifat dualistik. Di satu sisi, program ini penting untuk menjaga keberlangsungan hidup keluarga miskin dan meningkatkan akses mereka terhadap layanan dasar. Di sisi lain, bantuan yang diterima secara berulang berpotensi memperkuat orientasi bertahan hidup jangka pendek apabila tidak disertai dengan strategi pemberdayaan ekonomi yang memadai. Di sinilah letak persoalan ilmiahnya: PKH tidak cukup dipahami hanya sebagai program yang bermanfaat, tetapi juga perlu dianalisis sebagai kebijakan sosial yang menyimpan ketegangan antara fungsi perlindungan sosial dan tuntutan kemandirian ekonomi keluarga. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana dilema antara bantuan sosial dan kemandirian ekonomi keluarga muncul dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan bahwa rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Dilema antara bantuan sosial dengan kemandirian ekonomi Keluarga pada Program Keluarga Harapan?.

## **1.3 Definisi Operasional**

Menurut Kountur (2018) dalam Dekanawati et al (2023: 162), Definisi operasional merupakan penjabaran suatu variabel ke dalam bentuk yang dapat diukur, sehingga memungkinkan variabel tersebut untuk dianalisis secara empiris. Definisi operasional ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran antara peneliti dan pembaca mengenai konsep yang digunakan. Istilah seperti Dilema lalu Program Keluarga Harapan (PKH), kemandirian ekonomi keluarga dan keluarga penerima manfaat (KPM), akan dijelaskan sesuai dengan konteks penelitian, sehingga dapat menjadi pedoman dalam proses pengumpulan dan analisis data.

### **1.3.1 Dilema**

Istilah dilema dapat dimaknai sebagai suatu kondisi yang serba sulit, di mana seseorang dihadapkan pada pilihan yang sama-sama tidak menguntungkan dan sering kali menimbulkan kebingungan dalam menentukan keputusan. Dalam penelitian ini konteks dilema yang relevan yaitu dilema sosial, hal ini merupakan suatu kondisi ketika keluarga penerima manfaat dihadapkan pada konflik antara kepentingan individu untuk tetap bergantung pada bantuan demi keamanan ekonomi jangka pendek dengan tujuan kolektif program untuk mewujudkan kemandirian ekonomi keluarga.

Dilema ini tercermin dalam adanya konflik antara kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok, di mana tindakan rasional individu seperti mempertahankan status sebagai penerima bantuan justru berpotensi menimbulkan hasil kolektif yang merugikan berupa rendahnya tingkat kemandirian ekonomi masyarakat. Selain itu, keputusan individu untuk bergantung pada bantuan sering kali dipengaruhi oleh norma sosial dan perilaku kolektif di lingkungan sekitarnya, sehingga menciptakan

ketergantungan terhadap keputusan bersama. Dalam konteks ini, dilema juga mencakup aspek motivasi kemandirian ekonomi, yakni sejauh mana individu memiliki dorongan untuk meningkatkan pendapatan secara mandiri tanpa bergantung pada bantuan, serta persepsi terhadap efektivitas bantuan sosial sebagai stimulus awal menuju kemandirian, bukan sebagai sumber penghidupan utama. Dengan demikian, dilema sosial pada penerima PKH menggambarkan ketegangan antara pilihan rasional individu dan tujuan rasional kolektif dalam mencapai kesejahteraan jangka panjang.

### **1.3.2 Program keluarga Harapan (PKH)**

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial bersyarat yang dirancang oleh pemerintah untuk membantu keluarga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Bantuan sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan dalam bentuk dana tunai maupun non-tunai. Bantuan ini tidak hanya berfungsi sebagai solusi jangka pendek untuk mengurangi kerentanan keluarga miskin, tetapi juga diposisikan sebagai upaya jangka panjang yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup serta mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.

### **1.3.3 Kemandirian Ekonomi Keluarga**

kemandirian ekonomi keluarga dalam konteks penelitian ini adalah kemampuan suatu keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara berkelanjutan tanpa ketergantungan yang terus-menerus pada bantuan eksternal, melalui pengelolaan sumber daya yang dimiliki secara produktif, bijaksana, dan mandiri. Kemandirian ekonomi keluarga tercermin dari kapasitas anggota keluarga dalam mengembangkan usaha atau kegiatan ekonomi secara konsisten, berani mengambil risiko, serta memiliki kepercayaan diri dan ketahanan mental dalam menghadapi tantangan

ekonomi. Selain itu, keluarga yang mandiri secara ekonomi mampu mengelola arus kas dengan baik, memiliki orientasi investasi untuk masa depan, terbebas dari utang konsumtif, dan mampu memanfaatkan potensi ekonomi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Kemandirian ini tidak hanya diukur dari besarnya penghasilan, tetapi juga dari kemampuan keluarga dalam mengoptimalkan sumber daya, membangun daya tahan finansial, serta menjaga martabat dan kehormatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, kemandirian ekonomi keluarga dapat dipahami sebagai kondisi di mana keluarga menjadi unit ekonomi yang produktif, berdaya, dan memiliki kemampuan adaptif dalam menciptakan kesejahteraan tanpa bergantung pada bantuan sosial jangka panjang.

#### **1.3.4 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)**

Keluarga Penerima Manfaat merupakan keluarga miskin dan rentan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan data yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merupakan kelompok sasaran utama program yang mendapatkan bantuan sosial bersyarat dengan tujuan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan sosial dalam bentuk dana tunai/non-tunai sesuai komponen yang ditetapkan (pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, KPM menjadi unit analisis utama untuk melihat bagaimana bantuan PKH berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar, serta potensi terjadinya ketergantungan atau tercapainya kemandirian ekonomi.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis sifat dilema antara bantuan sosial dengan kemandirian ekonomi keluarga dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kebijakan sosial dan kesejahteraan masyarakat, khususnya terkait dilema antara bantuan sosial dan kemandirian ekonomi. Kajian ini juga memperkaya literatur tentang bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) tidak hanya dipandang sebagai instrumen konsumtif, tetapi juga sebagai sarana transformatif untuk mendorong pemberdayaan keluarga miskin.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Adapun secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah, khususnya Kementerian Sosial, agar PKH dapat dioptimalkan tidak hanya sebagai program perlindungan sosial, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pendamping PKH dalam merancang strategi pembinaan yang lebih efektif, serta mendorong keluarga penerima manfaat dalam mendukung terciptanya kemandirian ekonomi agar tidak bergantung pada bantuan sosial.

### **1.5.3 Manfaat Empiris**

Secara empiris, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran nyata mengenai dampak PKH terhadap keluarga penerima manfaat di Dusun Sindanggalih, Desa Rajadatu, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mampu mengungkap dinamika implementasi PKH di tingkat lokal, baik manfaat positif berupa peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kemiskinan, maupun sisi negatif berupa munculnya ketergantungan dan sikap pasif sebagian penerima. Dengan kata lain, penelitian ini menjadi bukti lapangan yang memperlihatkan faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat transformasi dari ketergantungan menuju kemandirian ekonomi.